

SINOPSIS

Penyelenggaraan seleksi CPNS yang kerap menjadi bahan pembicaraan masyarakat hingga fenomena ini berujung pada opini masyarakat yang sebagian masih tidak puas terhadap kinerja pejabat-pejabat pemerintah selaku penyelenggara sekaligus pengelola kepegawaian yang hampir secara keseluruhan menjadi tanggung jawab pemerintah. Banyaknya Polemik dan ketidakberesan seputar rekrutment CPNS yang secara teknis dinilai banyak kalangan sebagai kesalahan internal dan kurangnya pemuktahiran system yang cenderung mendukung terjadinya kesalahan berdampak menjadi semakin fatal. Hal ini memang sudah tidak asing lagi dan kerap menjadi langganan sebagai berita yang kerap diekspose oleh sejumlah media massa. Tidak hanya sampai disitu, Kelanjutan kasus ini kemudian mengundang rasa keingintahuan masyarakat mengenai pola kebijakan yang diterapkan pemerintah dalam upaya mencegah timbulnya distorsi-distorsi yang biasa dilakukan tiap kali penyelenggaraan seleksi CPNS khususnya ditingkat daerah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang objek yang diteliti. Selanjutnya data diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pegawai dan Kepala Sub Bidang Pengembangan Pegawai. Dengan objek wawancara yang tertuju kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sleman selaku instansi terkait penyelenggara seleksi CPNS. Data kemudian diolah secara analisis kualitatif dan hasilnya disajikan dan digambarkan secara jelas mengenai bagaimana kebijakan yang dilakukan untuk kemudian diolah berdasarkan fakta-fakta lapangan.

Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa banyaknya isu publik terkait dengan penyelenggaraan seleksi CPNS merupakan segelintir dari kasus-kasus yang berada didaerah-daerah termasuk diKabupaten Sleman sendiri. Permasalahan yang tak kunjung selesai menyusul dengan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap langkah pro-aktif pemerintah dalam menindaklanjuti problematika tersebut, dituding sebagai biang kegagalan utama pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan dan dalam memenuhi tuntutan publik. Sebenarnya untuk tingkat koordinasi antar penyelenggara dan pemerintah sendiri sudah selayaknya dapat dikatakan lebih efektif dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pendapat ini muncul seiring dengan keterlibatan petugas independen yang jumlahnya lebih dimaksimalkan demi pengamanan berlangsungnya penyelenggaraan seleksi CPNS Tahun 2009. Selain itu, berbagai bentuk inovasi-inovasi yang terus dikembangkan BKD sebagai langkah kongkrit dalam menjawab keraguan masyarakat. Upaya-upaya tersebut dilakukan, tidak lepas dalam rangka perbaikan citra dihadapan publik mengenai kebijakan pemerintah menuju penyelenggaraan Seleksi CPNS yang memang benar-benar transparan dan akuntabel. Agar lebih bersifat efektif, BKD menginginkan segala bentuk permasalahan terkait, untuk segera mungkin diminimalkan hingga memang benar-benar berdampak positif serta memberikan hasil nyata.

Sehubungan dengan hal itu, penulis merekomendasikan agar BKD lebih gencar dalam memaksimalkan peran publik, dengan membangun relasi dan kemitraan dengan masyarakat sebagai investigator diluar lapangan, Selain itu, BKD sebagai institusi yang berwenang dalam rekrutmen pegawai, dituntut harus bersikap terbuka dengan mempublikasikan segala hal yang berwujud fakta-fakta terkait dalam berita penyelenggaraan seleksi CPNS. Hal ini dilakukan dengan dasar untuk mewujudkan penyelenggaraan seleksi yang lebih transparan dan akuntabel.